

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arliman, Laurensius, S, (2018), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bachtiar, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang.
- Edrisy, Ibrahim, F, (2019), *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung.
- Kurniawan, D, (2023), *Belajar Pemrograman Web Dasar HTML, CSS, & Javascript Untuk Pemula*". Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Muhaimin, M, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nugroho, S, S, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Rusito, R, (2021), *Teknologi Internet: Dasar Internet Teknologi IoT (Internet of Thing) dan Bahasa HTML*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Solikin, N, (2019), *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qeira Media, Pasuruan.
- Solikin, N, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.
- Suarda, I, G, W, (2022), *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudaryono, (2017), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Suyanto, S, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Widiarty, W, S, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6905)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014  
NOMOR 297, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5606)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LEMBARAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4928)

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik  
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021,  
Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal  
Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah  
Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik.

### **C. Skripsi**

Nurcholis, 2015, *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) Dalam  
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Syarif  
Hidayatullah, Jakarta.

#### D. Jurnal

- Alfian, M, “*Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 2, Juni 2017. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i2.2331>
- Farrun, D, J, dan Ahmad, M, J, “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Pokok*”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 1, Januari 2023. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.221>
- Bentelu, A, S, Sentinuwo, S, dan Lantang, O, “*Animasi 3 Dimensi Pencegahan Cyber Crime (Studi Kasus: Kota Manado)*”, Jurnal Teknik Informatika, Vol. 8, No. 1, Agustus 2016. <https://doi.org/10.35793/JTI.8.1.2016.13171>
- Gani, A, G, “*Pengenalan teknologi internet serta dampaknya*”, JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma, Vol. 2, No. 2, Mei 2018. <https://doi.org/10.35968/JSI.V2I2.49>
- Gunadi, N, A, “*Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum*”, Muhammadiyah Law Review, Vol. 5, No. 2, Juli 2021. <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i2.1623>
- Putra, E, N, “*Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015. <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i1.680>
- Ramadhona, H, “*Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Dea Only Fans di Polda Metro Jaya)*”, Jurnal

Impresi Indonesia, Vol. 1, No. 10, Oktober 2022.

<https://doi.org/10.58344/jii.v1i10.574>

Sulistiati, T, Yuliansyah, F, Romzi, M, & Aryani, R, “*Membangun website toko online pempek nthree menggunakan PHP dan MYSQL*”, Jurnal Teknik Informatika Mahakarya, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.

#### **E. Internet**

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Survei Profil Internet Indonesia 2024”. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>. diakses pada tanggal 9 Januari 2025.

Kementerian Komunikasi dan Digital. “Aduan konten negatif didominasi pornografi”. <https://www.komdigi.go.id/berita/statistik-aduan-konten> diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

Kitab Besar Bahasa Indonesia. “Arti Kata *Asusila*”. <https://kbbi.web.id/asusila> diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

#### **F. Sumber Lain**

Data jumlah perkara pornografi siber dari tahun 2022 sampai dengan 2024, didapatkan dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2024.

Data jumlah perkara pornografi siber dalam bentuk penyebaran pada tahun 2024, didapatkan dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Brigpol Bagas, dan Briptu Rafi terkait dengan sampel kasus perkara peyebaran pornografi siber, di Gedung Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Briptu Nadeo Zidane terkait dengan penerapan hukum terhadap pelaku pembuat dapat diaksesnya *website* asusila dan pornografi anak, di Gedung Bantek Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Iptu Wiwit Widiyanto terkait satu sampel perkara, Berkas Perkara No. BP/83/IV/RES.25/DITRESKRIMSUS, di Gedung Bantek Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 2025.